



RENJA

(RENCANA KERJA)

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA PASURUAN

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

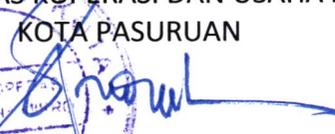
Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat-Nya, kami masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022. Rencana Kerja Tahun 2022 disusun sebagai implementasi dari Tahapan Kegiatan Tahunan dari Rencana Strategis yang disusun selama lima tahunan, dimana rencana kerja tahun 2022 ini disusun dalam upaya memberikan pedoman untuk rencana kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro selama tahun 2022.

Rencana Kerja Tahunan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan Tahun 2022, disusun dengan maksud sebagai referensi dan acuan dalam menterjemahkan Misi guna menuju Visi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk :

“MEWUJUDKAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO NAIK KELAS DALAM MEMPERCEPAT PERTUMBUHAN DAN KETAHANAN EKONOMI BERBASIS POTENSI LOKAL”

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya atas tersusunnya Rencana Kerja Tahunan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan Tahun 2022.

Pada akhirnya kami berharap agar Rencana Kerja Tahunan ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pasuruan, 23 Agustus 2021
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA PASURUAN

Drs. H. EDY ANA SETYOWIDODO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640505 199303 1 012

SISTEMATIKA PENULISAN

	Hal.
Keputusan Walikota	
Keputusan Kepala SKPD	
Kata Pengantar	I
Daftar isi	II
BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar belakang..... 1
1.2	Landasan Hukum..... 3
1.3	Maksud dan Tujuan..... 4
1.4	Sitematika Penulisan..... 5
BAB II	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah..... 6
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 8
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 9
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD 10
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 11
BAB III	TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 12
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah..... 13
3.3	Program dan Kegiatan 14
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V	PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan (Renja Koperasi dan Usaha Mikro) tahun 2022 merupakan suatu dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran/tujuan pembangunan urusan koperasi dan usaha mikro, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Isi Renja adalah menjabarkan sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pada satu tahun ke depan.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dengan persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi, menganalisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2022 merupakan pelaksanaan tahun dua (akhir tahun) rencana strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021-2026. Sedangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Visi Misi Walikota terpilih pada tahun 2021. Selanjutnya dari rencana strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021-2026 setiap tahun disusun Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja, Renja mempunyai fungsi penting dalam suatu sistem perencanaan daerah, penjelasan mengenai tindak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD,

karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Renstra).

Analisis renstra K/L dan SKPD Kabupaten/Kota ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD Provinsi terhadap sasaran Renstra K/L dan renstra SKPD Kabupaten/kota sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing SKPD. Hal tersebut diatas perlu perbaikan lingkungan usaha yang kondusif bagi peningkatan daya saing koperasi dan UMKM, dan perlu juga dilakukan peningkatan akses usaha koperasi dan UMKM kepada sumber daya produktif, kompetensi dan produktifitas usahanya. Mengacu pada Tema dan Prioritas RKPD 2022 Kota pasuruan yaitu , dengan 9 Prioritas yaitu;

1. Membangun Sistem Perizinan yang Berorientasi Pada Kemudahan Berusaha dan Investasi;
2. Menciptakan Daya Tarik Kunjungan Wisata dengan Wisata Religi, Heritage, dan Event Kreatif dengan Komunitas Lokal;
- 3. Membangun Sentra UMKM dan Industri Olahan untuk Membuka Lapangan Kerja;**
4. Penataan Kawasan Permukiman yang Terhubung dengan Aspek Perekonomian dan Layanan Dasar;
5. Memastikan Semua Lapisan Masyarakat Mudah dalam Mengakses Layanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan dari Covid 19
6. Menguatkan Modal Sosial yang Berkarakter dan Harmonisasi Antar Umat Beragama dan Etnis;
7. Menata Ruang Publik Hijau dan Nyaman yang Ramah Anak, Lansia, dan Difabel;
8. Menciptakan Budaya Kerja Birokrasi yang Adaptif, Lincah, dan Bersih;
9. Mendekatkan Layanan Kepada Masyarakat dengan Digitalisasi Layanan

Dengan mempertimbangkan kondisi internal maupun eksternal kedepan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan mendukung prioritas

pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah ke 3 yaitu Membangun Sentra UMKM dan Industri Olahan untuk Membuka Lapangan Kerja. Guna mencapai prioritas pembangunan tersebut, maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan telah menetapkan kebijakan yang akan ditempuh dalam satu tahun mendatang, yaitu :

1. Peningkatan kualitas, kuantitas usaha koperasi.
2. Peningkatan sumber daya manusia (SDM) pelaku Koperasi dan UMKM.
3. Digitalisasi dalam hal pengelolaan usaha dan pemasaran hasil usaha Koperasi dan UMKM.
4. Penguatan kelembagaan Koperasi dan UMKM.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena didalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja Perangkat Daerah merupakan masukan utama bagi penyusunan RKPP, RKA PD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.9 Tahun 2015 LNRI Tahun 2004 Nomor 104;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, LNRI Tahun 2004 Nomor 126;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, LNRI Tahun 2014 Nomor 244;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, LNRI Tahun 2003 Nomor 4286;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, LNRI Tahun 2008 Nomor 21;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJMD, dan RKPD, Berita Negara RI Tahun 2017 nomor 1312;
7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-2021, Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2019 Nomor 1;
8. Peraturan Walikota Kota Pasuruan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah;
9. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah :

1. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan Program/Kegiatan selama 1 (satu) Tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah :

1. Tersedianya acuan bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan Program/kegiatan dalam satu tahun anggaran.
2. Untuk perencanaan pengembangan, penumbuhan dan peningkatan dibidang koperasi dan usaha mikro melalui arah kebijakan, strategi serta sasaran – sasaran dan program yang ingin dicapai selama 1 tahun serta untuk mengukur kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam mendukung pembangunan Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Keputusan Walikota

Keputusan Kepala Dinas koperasi dan Usaha Mikro

Daftar isi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian
Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Hasil Evaluasi Program/ kegiatan pada tahun anggaran 2021 yang pelaksanaannya didukung oleh 7 program, 14 kegiatan, dan 32 Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar: Rp. 7.304.210.325,00 (Tujuh Milyar Tiga Ratus Empat Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima *rupiah*) dengan serapan anggaran sebesar Rp 423.497.213,00 (*Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Belas rupiah*) atau sebesar 5,80 persen sampai Tribulan I. Adapun indikator kinerja yang dihasilkan dari urusan **Bidang Koperasi dan Usaha Mikro** yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai berikut :

- Program Pengawasan dan Pemeriksaan dengan anggaran Rp.53.223.300,- dengan realisasi Rp. 0,- dengan serapan anggaran 0 %
- Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi dengan anggaran Rp.11.583.900,- dengan realisasi Rp. 0,- dengan serapan anggaran 0 %
- Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dengan anggaran Rp.692.961.240,- dengan realisasi Rp. 0 ,- dengan serapan anggaran 0 %
- Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan anggaran Rp.129.419.929,- dengan realisasi Rp. 0,- dengan serapan anggaran 0 %
- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) dengan anggaran Rp.2543.360.954,- dengan realisasi Rp. 0 ,- dengan serapan anggaran 0 %
- Program Pengembangan UMKM dengan anggaran Rp. 364.045.891,- dengan realisasi Rp. 0,- dengan serapan 0 %

Demikian Review evaluasi pelaksanaan program kegiatan di tahun 2021 dapat di capai kurang baik dengan capaian **5,80 %** sampai pada Tribulan I, Mendukung Kebijakan

Perencanaan dan Penganggaran program kegiatan yang lebih matang berdasar evaluasi tahun sebelumnya perlu di ambil kebijakan lanjutan dalam memaksimalkan target program kegiatan pelaksanaan.

Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan UM Kota Pasuruan berdasarkan program dan kegiatan pada Tahun 2020 secara umum dapat disimpulkan bahwa kinerja kegiatan yang penilaiannya berorientasi pada input output, Hasil evaluasi capaian RENJA SKPD sampai dengan tribulan I, dari 7 indikator program yang ada hanya terealisasi pada program PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Gaji dan tunjangan ASN (**tabel 2.1**)

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Analisis kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, untuk penyusunan program/ kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan tugas dan fungsi. Untuk menganalisis kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sesuai digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan. Disajikan (**tabel 2.2**)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro s/d Tahun 2021
Kota Pasuruan

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD 2016-2021) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
			Target	Satuan		Target	Realisasi	Tingkat Realisasi		Realisasi capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	BELANJA DAERAH										
2	URUSA PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2 17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										
2 17 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi							90		
2 17 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	90	%	0	0	0	0	90	0	0
2 17 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	2	dokumen	0	0	0	0	7	0	0
		Jumlah Dokumen Renja dan Renstra yang disusun	7	dokumen	0	0	0	0	2	0	0
		Presentase Usulan Stakeholder yang masuk dalam Dokumen Perencanaan	40	%	0	0	0	0	40	0	0
2 17 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja yang tersusun	4	dokumen	0	0	0	0	4	0	0
2 17 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah event publikasi hasil pembangunan	2	dokumen	0	0	0	0	2	0	0
2 17 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	90	%	0	0	0	0	90	0	0
2 17 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangan	14	bulan	0	0	0	0	14	4	0
2 17 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	6	dokumen	0	0	0	0	6	0	0
2 17 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Realisasi Anggaran yang disusun	2	laporan	0	0	0	0	12	0	0
2 17 01 2.01	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu	90	%	0	0	0	0	90	0	0
2 17 01 2.01	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen pelaporan barang OPD yang tersusun	4	dokumen	0	0	0	0	4	0	0
2 17 01 2.01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	90	%	0	0	0	0	80	0	0
2 17 01 2.01	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pengelolaan kepegawaian OPD yang tersusun	4	dokumen	0	0	0	0	4	0	0
2 17 01 2.01	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti pembinaan Rohani Aparatur	30	orang	0	0	0	0	35	0	0

2	17	01	2.03	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	90	%	0	0	0	0	80	0	0
2	17	01	2.03	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	7	jenis	0	0	0	0	7	0	0
2	17	01	2.03	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis kebutuhan Jasa barang cetakan dan penggandaan	6	jenis	0	0	0	0	6	0	0
2	17	01	2.03	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	2	eks	0	0	0	0	3	0	0
2	17	01	2.03	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	30	orang	0	0	0	0	34	0	0
2	17	01	2.03	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah	62	kali	0	0	0	0	62	0	0
2	17	01	2.01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	90	%	0	0	0	0	85	0	0
2	17	01	2.01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	5	unit	0	0	0	0	44	0	0
2	17	01	2.01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	90	%	0	0	0	0	80	0	0
2	17	01	2.01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Materai yang tersedia	350	unit	0	0	0	0	400	0	0
2	17	01	2.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	12	bulan	0	0	0	0	12	0	0
2	17	01	2.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah alat tulis	35	jenis	0	0	0	0	35	0	0
					Jumlah tenaga pendukung perkantoran	13	bulan	0	0	0	0	13	0	0
2	17	01	2.01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase barang milik daerah yang terpelihara	90	%	0	0	0	0	80	0	0
2	17	01	2.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah BBM	7	unit	0	0	0	0	10	0	0
					Jumlah ganti pelumas kendaraan dinas	7	unit	0	0	0	0	10	0	0
					Jumlah jasa servis kendaraan dinas	7	unit	0	0	0	0	10	0	0
					Jumlah STNK Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional	7	unit	0	0	0	0	10	0	0
					Jumlah suku cadang kendaraan kendaraan	7	unit	0	0	0	0	10	0	0
2	17	01	2.01	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan Kantor yang terpelihara	30	unit	0	0	0	0	30	0	0
2	17	01	2.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah kebutuhan	360	m2	0	0	0	0	30	0	0
					Jumlah Luasan gedung kantor yang terpelihara	415	unit	0	0	0	0	360	0	0
2	17	01	2.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luas taman, halaman, tempat parkir yang terpelihara	7	jenis	0	0	0	0	20	0	0
2	17	01		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Prosentase pertumbuhan koperasi yang melaksanakan RAT	16.13	%	0	0	0	0	2.78	0	0
2	17	01	2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan pemeriksaan dan pengawasan	71	koperasi	0	0	0	0	71	0	0
2	17	01	2.01	Pengawasan Kekuatan Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi	Jumlah dokumen Keragaan Koperasi yang disusun	60	koperasi	0	0	0	0	12	0	0